



SALINAN

**BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 47 TAHUN 2018**

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM DI DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada Pemerintahan Desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka perlu disusun Standar Biaya Umum di Desa Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum di Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor

05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 45);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 27);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
3. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, baik berupa standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.
4. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya kegiatan.
5. Harga Satuan adalah nilai satuan yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya kegiatan.
6. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya kegiatan.
7. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk perhitungan biaya kegiatan.
8. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya kegiatan.
9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

10. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disebut PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
11. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa dan/atau masyarakat yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

Pasal 2

Standar Biaya Umum adalah biaya masukan dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa serta perubahannya dan turunannya.

BAB II STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Masukan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Tabalong untuk menyusun komponen biaya masukan dalam DPA, DPPA, DPAL, RAK.
- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Masukan berfungsi sebagai:
 - a. Batas tertinggi; atau
 - b. Estimasi
- (3) Standar Biaya Masukan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI TABALONG,
ttd 

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2018 NOMOR 47.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 47 TAHUN 2018
 TENTANG
 STANDAR BIAYA UMUM DI DESA TAHUN ANGGARAN 2019

STANDAR BIAYA UMUM DI DESA

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	HONOR PKPKD	OB	Rp. 500.000,-
2.	HONOR PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD) - Koordinator	OB	Rp. 450.000,-
3.	Honorarium Ketua TPK : a. nilai pagu dana sd Rp. 50 jt b. nilai pagu dana diatas Rp. 50 jt sd Rp. 100 jt c. nilai pagu dana diatas Rp. 100 jt sd Rp. 250 jt d. nilai pagu dana diatas Rp. 250 jt sd Rp. 500 jt e. nilai pagu dana lebih dari Rp.500 jt	OK OK OK OK OK	Rp. 500.000,- Rp. 600.000,- Rp. 700.000,- Rp. 800.000,- Rp. 1.000.000,-
4.	Honorarium Sekretaris TPK : a. nilai pagu dana sd Rp. 50 jt b. nilai pagu dana diatas Rp. 50 jt sd Rp. 100 jt c. nilai pagu dana diatas Rp. 100 jt sd Rp. 250 jt d. nilai pagu dana diatas Rp. 250 jt sd Rp. 500 jt e. nilai pagu dana lebih dari Rp.500 jt	OK OK OK OK OK	Rp. 350.000,- Rp. 450.000,- Rp. 550.000,- Rp. 650.000,- Rp. 850.000,-
5.	Honorarium Anggota TPK : a. nilai pagu dana sd Rp. 50 jt b. nilai pagu dana diatas Rp. 50 jt sd Rp. 100 jt c. nilai pagu dana diatas Rp. 100 jt sd Rp. 250 jt d. nilai pagu dana diatas Rp. 250 jt sd Rp. 500 jt e. nilai pagu dana lebih dari Rp.500 jt	OK OK OK OK OK	Rp. 250.000,- Rp. 350.000,- Rp. 450.000,- Rp. 550.000,- Rp. 750.000,-
6.	Honorarium Tim Penyusunan RPJM Desa maksimal 7 (tujuh) orang. - Ketua - Sekretaris - Anggota	OK OK OK	Rp. 500.000,- Rp. 350.000,- Rp. 300.000,-
7.	Honorarium Panitia Penyusun RKP Desa maksimal 7 (tujuh) orang. - Ketua - Sekretaris - Anggota	OK OK OK	Rp. 450.000,- Rp. 300.000,- Rp. 250.000,-

8.	Honorarium Panitia Penyusun APBDesa maksimal 7 (tujuh) orang. - Ketua - Sekretaris - Anggota	OK OK OK	Rp. 450.000,- Rp. 300.000,- Rp. 250.000,-
9.	Insentif Guru TK/PAUD/Taman Belajar Keagamaan milik atau yang dikelola oleh Pemerintah Desa	OB	Rp. 350.000,-
10.	Insentif Kader Kesehatan	OB	Rp. 100.000,-
11.	Honor Petugas Kebersihan Kantor Desa (maksimal 1 orang)	OB	Rp. 500.000,-
12.	Honor Jaga Malam/Wakar Kantor Desa (maksimal 1 orang)	OB	Rp. 500.000,-
13.	Biaya snack/camilan harian aparat desa	OH	Rp. 5.000,-
14.	Snack/camilan Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan dan sejenisnya	Kotak	Rp. 10.000,-
15.	Makan siang/malam Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan dan sejenisnya	porsi	Rp. 25.000,-
16.	Honor Panitia Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan dan sejenisnya (jumlah panitia maksimal sebanyak jumlah desa yang melaksanakan dengan keanggotaan berasal dari unsur desa dan ASN dari kecamatan): Ketua Sekretaris Anggota (Honor narasumber tersebut adalah total keseluruhan dari yang dianggarkan oleh desa-desa yang melaksanakan)	OK OK OK	Rp. 200.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,-
17.	Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan dan sejenisnya yang dilaksanakan di Hotel : a. Fullday b. halfday harga sudah termasuk Pajak	OHP OHP	Rp. 200.000,- Rp. 150.000,-
18.	Honor Narasumber Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan Desa : Eselon II Eselon III Eselon IV/Golongan III (Honor narasumber tersebut adalah total keseluruhan dari yang dianggarkan oleh desa-desa yang melaksanakan)	OJ OJ OJ	Rp. 1.000.000,- Rp. 900.000,- Rp. 750.000,-

19.	Uang saku / harian peserta Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan dan sejenisnya		Mengikuti Indeks Biaya Perjalanan Dinas
20.	Biaya Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Provinsi		Maksimal 10% dari Operasional Pemerintahan Desa
21.	HONORARIUM PANITIA PENYUSUN BUKU PROFIL DESA (maksimal 7 orang) Penanggungjawab (Kades) Ketua (Sekdes) Sekretaris (Kasi/kaur) Anggota (Kaur/Kasi orang)	OK OK OK OK	Rp. 225.000,- Rp. 200.000,- Rp. 175.000,- Rp. 150.000,-
22.	HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (maksimal 7 orang) Ketua Sekretaris Anggota	OK OK OK	Rp. 1.250.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 800.000,-
23.	HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU (maksimal 5 orang) Ketua Sekretaris Anggota	OK OK OK	Rp. 350.000,- Rp. 300.000,- Rp. 250.000,-
24.	HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (maksimal 7 orang) Ketua Sekretaris Anggota	OK OK OK	Rp. 350.000,- Rp. 300.000,- Rp. 250.000,-
25.	HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN BPD ANTAR WAKTU (maksimal 5 orang) Ketua Sekretaris Anggota	OK OK OK	Rp. 250.000,- Rp. 200.000,- Rp. 150.000,-
26.	HONORARIUM PANITIA SELEKSI APARAT DESA (maksimal 5 orang) Ketua Sekretaris Anggota	OK OK OK	Rp. 350.000,- Rp. 300.000,- Rp. 250.000,-

27.	HONOR PANITIA PENYUSUNAN LAPORAN KEPALA DESA (LPPD DAN LKPPD) (maksimal 7 orang) Ketua Sekretaris Anggota	OK OK OK	Rp. 200.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,-
28.	BIAYA MAKANAN BALITA UNTUK KEGIATAN POSYANDU	porsi	Rp. 7.500,-
29.	BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL RODA 4 (diluar pembayaran pajak)	Unit/th	Rp. 5.000.000,-
30.	BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL RODA 3	Unit/th	Rp. 2.500.000,-
31.	BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS RODA 2 (Sepeda motor)	Unit/th	Rp. 1.500.000,-

PENJELASAN
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2019
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. Honorarium yang diberikan kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Pejabat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
 Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan pada setiap satuan kerja diberi berdasarkan besaran pagu yang dikelola, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala desa bertanggungjawab terhadap seluruh Pengelolaan Keuangan desa;
 - b. Kepala desa dalam melaksanakan tugasnya melimpahkan sebagian kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada PPKD dan TPK;
 - c. PKPKD/PPKD menerima honorarium maksimal 11 (sebelas) bulan dan sesuai dengan kebutuhan waktu pelaksanaan kegiatan, sedangkan TPK dibayar per kegiatan;

2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
 - a. Honorarium TPK paling banyak 5% (lima persen) dari pagu kegiatan yang dikelola;
 - b. Honorarium diberikan kepada Anggota TPK yang diangkat oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola, dan melalui penyedia barang/jasa (pihak ketiga) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Honorarium Anggota TPK diberikan per kegiatan dan dianggarkan pada kode rekening belanja modal pada setiap kegiatan yang dikelolanya.
 - d. Tenaga Teknis/Tim Pendukung
 Dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah Desa dimana memerlukan keahlian khusus, maka dapat melibatkan tenaga pendamping profesional yang tergabung dalam (P3MD).

3. Honorarium Tim Perencanaan Desa, Tim Anggaran Desa dan Tim Penyusun Laporan Pemerintah Desa.

 Honorarium hanya diberikan kepada tim yang dibentuk oleh Pemerintah Desa yang diberi tugas diantaranya melakukan penyusunan RPJMDes /RKPDDes/RKPDDesP, APBDDes/APBDDesP, LPPD, LKPPD dan Profil Desa.

4. Honorarium Narasumber/Panitia.
 Honorarium narasumber dapat diberikan kepada ASN dan Non ASN yang memiliki kompetensi sesuai dengan materi kegiatan.

Catatan:

1. satuan jam yang digunakan untuk kegiatan seminar /sosialisasi/ bimbingan teknis/ penilaian, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan adalah 60 (enam puluh) menit.
2. narasumber dengan ketentuan :
 - a. berasal dari lembaga pemerintah yang berkompeten;
 - b. berasal dari Badan/Lembaga Non Pemerintah yang sudah mendapat sertifikasi dari Kementerian/ Lembaga Negara yang membidangnya; dan
 - c. melampirkan paparan/ materi yang akan disampaikan.

Honorarium Panitia yang diberikan kepada Anggota Panitia yang diberi tugas oleh Kepala Desa/Perwakilan Kepala Desa untuk melaksanakan tugas melaksanakan kegiatan seminar /sosialisasi / bimbingan teknis/ penilaian, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

5. Honorarium Petugas Khusus.

Honorarium yang diberikan oleh pemerintah desa kepada seseorang yang ditugaskan khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu seperti Narasumber pelatihan pengurusan jenazah, penceramah, dan lain-lain. Honorarium sudah termasuk uang transport dan besaran tarif disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum.

6. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan.

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada unsur dari Aparatur Pemerintah Desa dan unsur dari Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terlibat dan berkontribusi langsung dalam proses/pencapaian *output* kegiatan.

7. Honorarium Tim Penyusunan/Pembahasan Rancangan Produk Hukum Desa.

Produk hukum desa adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan peraturan bersama Kepala Desa.

Yang dimaksud dengan Tim Penyusunan Rancangan Produk Hukum Desa adalah Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Desa, Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa dan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Yang dimaksud dengan Tim Pembahasan Rancangan Produk Hukum Desa adalah Tim Pembahas Rancangan Peraturan Desa, Rancangan Peraturan Kepala Desa, dan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disampaikan kepada BPD untuk dibahas bersama, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab : Kepala Desa
- b. Ketua : Sekretaris Desa
- c. Sekretaris : Kasi dan Kaur yang membidangi
- d. Anggota : Kasi dan Kaur

Honorarium diberikan untuk tiap produk hukum yang disusun/dibahas.

Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Desa dan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Desa/atau Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

8. Satuan Biaya Snack Aparatur Pemerintah Desa

Snack diberikan kepada Aparatur Pemerintah Desa yang dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja, pengalokasian dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa paling banyak per Aparatur Pemerintah Desa 22 (dua puluh dua) hari dalam 1 (satu) bulan. Satuan Uang snack ini merupakan batas tertinggi dalam penyediaan snack Aparatur Pemerintah Desa.

BUPATI TABALONG,
Htd

ANANG SYAKHFIANI